

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSELITERASI	xii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxii
المخلص	xxiv
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR GAMBAR	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Penegasan Istilah	14
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Konsep <i>Syura</i>	22
B. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	29
C. <i>Fiqh Siyasah</i>	33

D. Penelitian Terdahulu	36
E. Kerangka Teoritik	41
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Kehadiran Peneliti.....	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Uji Keabsahan Data.....	50
H. Tahapan Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
A. Gambaran Lokasi Penelitian	52
B. Prinsip-Prinsip <i>Syura</i>	62
C. Temuan Penelitian.....	83
BAB V PEMBAHASAN	86
A. Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Syura</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Maron	86
B. Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Syura</i> Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Dan <i>Fiqh Siyasah</i>	95
BAB VI PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Implikasi.....	110
C. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Kepala Desa Menurut Tahun.....	55
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Maron	59
Tabel 4. 3 Jumlah Lahan Penduduk Desa Maron	60
Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Maron	60
Tabel 4. 5 Tempat pendidikan Di Desa Maron	61
Tabel 4. 6 Tempat Ibadah Desa Maron.....	61
Tabel 4. 7 Transkrip Wawancara.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka teoritik.....	41
Gambar 4. 1 Peta Desa Maron	56
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Desa Maron	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan yang baik dan ideal merupakan syarat utama bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Setiap Negara pada dasarnya membutuhkan prinsip-prinsip pokok yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu prinsip yang ada di pemerintahan modern adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan menjadi ciri khas dari demokrasi itu sendiri, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah pembangunan.

Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi, melainkan berlandaskan pada semangat permusyawaratan yang menekankan kebebasan serta kebersamaan. Musyawarah (*Syura*) dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dalam suatu forum atau agenda yang dilakukan secara mufakat. Secara ideal, rakyat Indonesia pun dituntut untuk mengedepankan musyawarah sebagai sarana mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Musyawarah untuk mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Tujuan